



Dynamics of PKS Internal Cadre Nominations in the 2024 Bandar Lampung City Regional Elections

Nur Islam¹, Eny Inti Suryani²
^{1,2}Universitas Muhammadiyah Lampung
Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email correspondence : nurislam67719600@gmail.com

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the dynamics of the nomination process of internal cadres of the Prosperous Justice Party and to identify the factors influencing the party's decisions in determining candidates in the 2024 Bandar Lampung mayoral election.

Design/Methodology/Approach: This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving party officials, cadres, and local political observers. Data analysis was conducted interactively using the Miles, Huberman, and Saldaña model, with triangulation techniques applied to ensure the validity and credibility of the findings.

Findings: The findings reveal that the nomination process of internal cadres within the Prosperous Justice Party is formally structured through a hierarchical mechanism from the local to the central level, yet it remains influenced by informal dynamics and the dominance of party elites. Internal factors such as cadre loyalty, political capacity, and proximity to party elites serve as initial considerations, while external factors including electability, political coalitions, public pressure, and local political competition become the primary determinants in final decision-making. This dynamic reflects a tension between the idealism of cadre-based development and political pragmatism in pursuing electoral victory.

Practical Implications: This study provides recommendations for political parties, particularly the Prosperous Justice Party, to strengthen transparent and merit-based candidate selection systems that are integrated with electoral considerations, in order to maintain a balance between cadre loyalty and electoral competitiveness.

Originality/Value: This study offers novelty by specifically examining the dynamics of internal cadre nomination at the local level, particularly in the Bandar Lampung mayoral election. It not only highlights formal processes but also reveals the interaction between party structures, power relations, and external pressures. The findings contribute to the development of candidate selection analysis by integrating institutional and rational approaches within the context of cadre-based political parties.

Keywords: Cadre Nomination, Prosperous Justice Party, 2024 Local Election, Political Recruitment

Article Type: Research Paper

Dinamika Pencalonan Kader Internal PKS pada PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan partai dalam menetapkan kandidat pada kontestasi Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus partai, kader, dan pengamat politik lokal. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencalonan kader internal PKS berlangsung secara terstruktur melalui mekanisme berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika informal dan dominasi elite partai. Faktor internal seperti loyalitas kader, kapasitas politik, dan kedekatan dengan elite menjadi pertimbangan awal, sementara faktor eksternal seperti elektabilitas, koalisi politik, tekanan publik, dan kompetisi lokal menjadi determinan utama dalam keputusan akhir. Dinamika ini mencerminkan adanya ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik dalam upaya memenangkan kontestasi.

Implikasi Praktis : Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi partai politik, khususnya PKS, untuk memperkuat sistem seleksi kandidat yang transparan, berbasis meritokrasi, dan terintegrasi dengan pertimbangan elektoral guna menjaga keseimbangan antara loyalitas kader dan peluang kemenangan politik.

Originalitas/Nilai : Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji dinamika pencalonan kader internal PKS di tingkat lokal, khususnya Pilkada Kota Bandar Lampung. Studi ini tidak hanya menyoroti proses formal, tetapi juga interaksi antara struktur partai, relasi kekuasaan, dan tekanan eksternal. Temuan ini memperkaya model analisis *candidate selection* melalui integrasi pendekatan institusional dan rasional dalam konteks partai berbasis kader.

Kata Kunci : *Pencalonan Kader, Partai Keadilan Sejahtera, Pilkada 2024, Rekrutmen Politik*

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Dinamika pencalonan kepala daerah dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia merupakan fenomena yang terus mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya desentralisasi politik pasca reformasi (Fitriyah 2020). Pilkada sebagai instrumen demokrasi elektoral membuka ruang kompetisi yang tidak hanya melibatkan figur eksternal, tetapi juga kader internal partai politik (Wijaya and Perdana 2024). Literatur politik kontemporer menunjukkan bahwa partai politik memiliki fungsi strategis dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, sebagaimana ditegaskan oleh Yusra yang menyatakan bahwa kandidat selection merupakan “jantung” dari demokrasi intra-partai (Yusra, Romli, and Noor 2022). Dalam konteks ini, dinamika pencalonan kader internal menjadi isu penting karena mencerminkan tingkat institusionalisasi partai dan konsistensi ideologinya.

Kajian mengenai rekrutmen politik menunjukkan adanya perdebatan antara model sentralistik dan desentralistik dalam penentuan kandidat (Rahma and Pinem 2025). Ridwan and Fatkhuri menjelaskan bahwa partai modern cenderung menghadapi dilema antara mempertahankan kontrol elit pusat dengan membuka partisipasi akar rumput (Ridwan and Fatkhuri 2023). Fenomena ini juga ditemukan dalam konteks Indonesia, di mana banyak partai masih menerapkan mekanisme elitis dalam menentukan calon kepala daerah (Fitriyah 2020). Penelitian oleh Ridwan and Fatkhuri menunjukkan bahwa personalisasi politik seringkali mengalahkan loyalitas kader internal, sehingga kandidat eksternal lebih diutamakan dibandingkan kader partai sendiri (Ridwan and Fatkhuri 2023).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai komitmen partai terhadap kaderisasi politik. Haq menekankan pentingnya partai dalam membangun kader yang kompeten sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif (Haq, Rizal, and Saptaji 2025). Dalam praktiknya, partai politik di Indonesia seringkali mengalami inkonsistensi antara fungsi kaderisasi dan strategi elektoral pragmatis (Hadi and Gandryani 2024). Studi oleh Manurung menunjukkan bahwa partai-partai cenderung mengusung kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi meskipun bukan berasal dari kader internal, terutama dalam kontestasi Pilkada yang kompetitif (Manurung 2018).

Fenomena tersebut juga terlihat dalam dinamika pencalonan di tingkat lokal, termasuk di Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024. Secara empiris, partai politik di daerah menghadapi tekanan untuk memenangkan kontestasi sehingga strategi pencalonan menjadi sangat pragmatis (Noor 2018). Data dari berbagai pemberitaan dan laporan politik lokal menunjukkan bahwa kompetisi Pilkada di Bandar Lampung melibatkan aktor-aktor dengan latar belakang beragam, baik dari kader partai maupun figur eksternal yang memiliki basis popularitas kuat (Saputra et al. 2025). Hal

ini menimbulkan dinamika internal dalam partai, khususnya terkait legitimasi kader yang telah lama berproses dalam struktur organisasi.

Berbeda dengan sebagian besar partai politik di Indonesia yang dalam praktik pencalonan kepala daerah cenderung mengedepankan figur populer atau tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi, PKS sejak awal dikenal sebagai partai berbasis kader yang menerapkan sistem kaderisasi secara berjenjang, sistematis, dan berorientasi pada pembinaan ideologi. Sistem tersebut membedakan PKS dengan banyak partai lain karena proses pembentukan pemimpin dilakukan melalui tahapan pembinaan yang relatif panjang sebelum memperoleh kesempatan menduduki jabatan politik.

Karakteristik tersebut menjadikan PKS menarik untuk dikaji karena mampu memperlihatkan bagaimana sebuah partai yang memiliki sistem kaderisasi kuat menghadapi dilema ketika memasuki kontestasi elektoral. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dinamika pencalonan kader PKS, tetapi juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem kaderisasi masih menjadi dasar pengambilan keputusan politik ketika partai dihadapkan pada tuntutan memenangkan Pilkada.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai berbasis kader memiliki karakteristik unik dalam sistem kaderisasi yang relatif sistematis dan ideologis (Arpanudin 2010). Menurut penelitian Sholeh, PKS dikenal sebagai partai dengan sistem pembinaan kader yang terstruktur melalui halaqah dan tarbiyah (Sholeh 2015). Model ini secara teoritis seharusnya menghasilkan kader yang siap untuk dicalonkan dalam berbagai kontestasi politik (Arrasyid and Abidin 2020). Namun demikian, dalam praktik elektoral, PKS juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara idealisme kaderisasi dan tuntutan pragmatis elektabilitas.

Perdebatan akademik terkait PKS seringkali menyoroiti inkonsistensi antara identitas ideologis dan strategi politiknya. Basyir mengungkapkan bahwa PKS mengalami transformasi dari partai dakwah menjadi partai politik pragmatis yang lebih fleksibel dalam koalisi dan pencalonan kandidat (Basyir 2014). Transformasi ini berdampak pada pola rekrutmen politik, termasuk dalam pencalonan kepala daerah (Kusnadi, Wawan, and Hikmawan 2024). Dalam beberapa kasus, PKS tidak selalu mengusung kader internal sebagai calon utama, melainkan berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung kandidat eksternal (Syamsuadi et al. 2020).

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, dinamika pencalonan kader internal PKS menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan interaksi antara struktur organisasi partai, preferensi elite, dan tekanan elektoral. Fakta sosial menunjukkan bahwa terdapat kader-kader PKS yang memiliki pengalaman politik dan basis massa yang cukup kuat, namun belum tentu mendapatkan prioritas dalam pencalonan (Kusnadi et al. 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai

mekanisme seleksi kandidat di internal partai serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Kajian sebelumnya mengenai Pilkada di Indonesia lebih banyak berfokus pada aspek perilaku pemilih, strategi kampanye, dan koalisi partai. Penelitian oleh Rahawarin menyoroti politik uang dan klientelisme sebagai faktor dominan dalam Pilkada (Rahawarin 2022). Sementara itu, studi mengenai dinamika internal partai dalam pencalonan kandidat masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada partai berbasis kader seperti PKS (Harjanto 2011). Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai proses internal partai dalam menentukan kandidat.

Literatur lain dari Chalik menunjukkan bahwa desentralisasi telah memperkuat peran elite lokal dalam menentukan arah politik daerah, termasuk dalam proses pencalonan (Chalik 2017). Hal ini berarti bahwa keputusan pencalonan tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur pusat partai, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika lokal. Dalam kasus PKS di Bandar Lampung, interaksi antara elite lokal dan pusat menjadi faktor penting yang mempengaruhi pencalonan kader internal.

Penelitian terkait kaderisasi partai di Indonesia juga menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan loyalitas kader. Bilqis mengungkapkan bahwa sistem politik yang kompetitif mendorong partai untuk lebih fleksibel dalam memilih kandidat (Bilqis, Puspitasari, and Ananta 2025). Akibatnya, kader internal seringkali harus bersaing dengan figur eksternal yang memiliki sumber daya lebih besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan internal dalam partai dan mempengaruhi soliditas organisasi.

Dalam perspektif teori institusionalisasi partai, Wicaksono menekankan bahwa partai yang terinstitusionalisasi dengan baik akan memiliki mekanisme rekrutmen yang konsisten dan transparan (Wicaksono 2023). Ketika partai gagal mempertahankan konsistensi tersebut, maka kepercayaan kader dan publik terhadap partai dapat menurun. Dinamika pencalonan kader internal PKS di Bandar Lampung menjadi indikator penting untuk menilai tingkat institusionalisasi partai tersebut dalam konteks lokal.

Berdasarkan paparan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan antara kajian teoritis mengenai kaderisasi partai dan realitas empiris dalam pencalonan kepala daerah. Sebagian besar penelitian masih menempatkan partai sebagai aktor monolitik tanpa mengkaji dinamika internalnya secara mendalam (Rahma and Pinem 2025). Selain itu, studi yang secara spesifik mengkaji PKS dalam konteks Pilkada lokal, khususnya di Kota Bandar Lampung, masih sangat terbatas. Kesenjangan ini membuka ruang bagi penelitian untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana dinamika pencalonan kader internal PKS berlangsung dalam kontestasi Pilkada 2024.

Dengan demikian, latar belakang ini mengarahkan pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan partai dalam menentukan kandidat di tengah tarik-menarik antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik elektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera dalam kontestasi Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan interaksi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (John Creswell et al. 2017) bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena dalam konteks alamiah. Desain studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena spesifik dalam konteks tertentu (Yin 2018), sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap proses internal partai, relasi kekuasaan, serta pertimbangan strategis dalam penentuan kandidat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan mengungkap pola, faktor, dan dinamika yang memengaruhi keputusan pencalonan kader internal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, dua orang pengurus DPW PKS Provinsi Lampung, dua kader internal PKS yang mengikuti proses penjurangan, seorang anggota DPRD dari Fraksi PKS, serta dua orang pengamat politik lokal. Pengumpulan data dilaksanakan sejak November 2025 sampai dengan April 2026. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pencalonan, seperti pengurus partai tingkat daerah, kader potensial, serta pengamat politik lokal. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono 2019). Observasi dilakukan untuk memahami dinamika interaksi internal partai, sementara dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen resmi partai, berita media, serta arsip terkait proses Pilkada. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sebagaimana disarankan oleh (Creswell and Creswell 2018), guna meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model Miles, Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Proses analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan

hubungan antar variabel secara sistematis. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan dinamika pencalonan kader internal, seperti mekanisme seleksi, peran elite partai, serta faktor elektabilitas. Keabsahan hasil penelitian diperkuat melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sesuai dengan prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas ilmiah yang tinggi dan relevansi terhadap pengembangan kajian politik lokal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Proses Pencalonan Kader Internal PKS dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung

Dinamika proses pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya tahapan yang terstruktur secara formal, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika internal yang bersifat fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen partai, proses penjurian kandidat diawali dengan mekanisme usulan dari tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang kemudian diteruskan ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Pusat (DPP). Mekanisme ini mencerminkan model rekrutmen politik yang berlapis sebagaimana dijelaskan oleh Fitriyah bahwa seleksi kandidat dalam partai modern melibatkan interaksi antara aktor lokal dan pusat (Fitriyah 2020). Praktik ini juga sejalan dengan karakter organisasi PKS yang menekankan koordinasi struktural dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Tahapan seleksi kader dalam proses pencalonan menunjukkan adanya integrasi antara aspek ideologis dan pragmatis. Kader yang diusulkan umumnya telah melalui proses pembinaan yang panjang melalui sistem tarbiyah, sehingga memiliki legitimasi internal yang kuat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek elektabilitas tetap menjadi pertimbangan utama dalam tahap akhir seleksi. Temuan ini sejalan dengan Kusnadi yang menyatakan bahwa partai politik cenderung mengkombinasikan antara loyalitas organisasi dan daya saing elektoral dalam menentukan kandidat (Kusnadi et al. 2024). Kondisi tersebut mencerminkan adanya adaptasi PKS terhadap tuntutan sistem politik yang kompetitif di tingkat lokal.

Peran struktur partai dalam proses pencalonan terlihat dominan, khususnya dalam menentukan kandidat yang akan diusung secara resmi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan akhir tetap berada pada tingkat pusat melalui mekanisme musyawarah dan pertimbangan strategis. Informan I (Pengurus DPD PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 18 Februari 2025) menyatakan, "Proses di daerah itu hanya mengusulkan dan memetakan potensi kader, tetapi keputusan final tetap di DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peluang menang".

Pernyataan ini menunjukkan adanya pola sentralisasi keputusan yang masih kuat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Richter yang menyoroti dominasi elite pusat dalam partai-partai di Indonesia(Richter 2017).

Interaksi antar aktor internal partai menjadi bagian penting dalam dinamika pencalonan kader. Proses komunikasi tidak hanya berlangsung secara formal melalui forum rapat, tetapi juga melalui pendekatan informal yang melibatkan negosiasi dan konsolidasi internal. Observasi menunjukkan bahwa elite partai memiliki peran signifikan dalam membangun konsensus terhadap kandidat tertentu. Kondisi ini memperkuat temuan yang menyebutkan bahwa proses seleksi kandidat seringkali dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan internal dan hubungan interpersonal(Susanti 2017). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pencalonan kader tidak sepenuhnya bersifat administratif, tetapi juga politis.

Implementasi nilai kaderisasi dalam proses pencalonan menunjukkan adanya konsistensi normatif, meskipun dihadapkan pada realitas politik yang kompleks. PKS tetap memberikan ruang prioritas bagi kader internal yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti loyalitas, kapasitas kepemimpinan, dan rekam jejak organisasi. Informan II (Kader PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 21 Februari 2025) mengungkapkan, "Secara prinsip, PKS memang mengutamakan kader sendiri, tetapi dalam situasi tertentu harus realistis melihat kekuatan lawan dan kondisi politik." Pernyataan ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik, sebagaimana diungkapkan oleh Kusnadi dalam kajiannya tentang transformasi PKS(Kusnadi et al. 2024).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika pencalonan kader internal PKS di Kota Bandar Lampung mencerminkan proses adaptasi partai terhadap konteks lokal yang spesifik. Faktor seperti peta kekuatan politik, popularitas kandidat, serta potensi koalisi turut mempengaruhi jalannya proses seleksi. Analisis ini sejalan dengan temuan Ridwan and Fatkhuri yang menyatakan bahwa desentralisasi politik di Indonesia memperkuat peran aktor lokal dalam menentukan arah kebijakan partai(Ridwan and Fatkhuri 2023). Dengan demikian, dinamika proses pencalonan kader internal PKS tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme internal partai, tetapi juga oleh konteks eksternal yang membentuk strategi politik secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pencalonan Kader Internal PKS

Faktor internal menjadi determinan utama dalam mempengaruhi keputusan pencalonan kader internal PKS pada Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung. Loyalitas kader terhadap ideologi dan struktur partai menjadi indikator awal dalam proses seleksi, mengingat PKS dikenal sebagai partai berbasis kader dengan sistem pembinaan yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader yang

memiliki rekam jejak panjang dalam proses tarbiyah cenderung mendapatkan legitimasi lebih kuat dalam tahap penjurangan awal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fitriyah yang menekankan pentingnya integrasi antara identitas organisasi dan seleksi kandidat dalam memperkuat institusionalisasi partai (Fitriyah 2020). Loyalitas tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan struktural, tetapi juga komitmen terhadap visi politik partai.

Kapasitas politik kader menjadi faktor internal lain yang signifikan dalam menentukan keputusan pencalonan. Kapasitas ini mencakup pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi politik, serta rekam jejak dalam jabatan publik maupun legislatif. Data wawancara menunjukkan bahwa kader dengan pengalaman politik yang luas memiliki peluang lebih besar untuk dipertimbangkan sebagai kandidat. Informan III (Kader PKS Kota Bandar Lampung, wawancara, 21 Februari 2025) menyatakan, "Kader yang diusung bukan hanya yang loyal, tetapi juga yang punya kapasitas memimpin dan dikenal publik." Pernyataan ini memperkuat argumen Ridwan and Fatkhuri bahwa kualitas kandidat menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi, terutama dalam sistem demokrasi kompetitif (Ridwan and Fatkhuri 2023).

Kedekatan dengan elite partai turut menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika pencalonan. Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan interpersonal antara kader dan elite partai, baik di tingkat daerah maupun pusat, mempengaruhi tingkat akses terhadap proses pengambilan keputusan. Fenomena ini mencerminkan adanya pola patronase internal yang masih berlangsung dalam tubuh partai politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Chalik yang menunjukkan bahwa elite partai memiliki peran dominan dalam menentukan kandidat di Indonesia (Chalik 2017). Kedekatan tersebut seringkali menjadi faktor penentu dalam situasi di mana beberapa kandidat memiliki kapasitas yang relatif setara.

Faktor eksternal juga memainkan peran krusial dalam mempengaruhi keputusan pencalonan, terutama terkait dengan elektabilitas kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa survei elektabilitas menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan kandidat yang diusung. Partai cenderung mempertimbangkan figur yang memiliki tingkat popularitas dan peluang kemenangan tinggi di mata publik. Informan IV (Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung, wawancara, 5 Maret 2025), "Realitas politik tidak bisa diabaikan, survei menjadi acuan penting untuk melihat peluang menang di Pilkada." Pernyataan ini menguatkan temuan yang menunjukkan bahwa perilaku partai di Indonesia semakin dipengaruhi oleh logika elektoral (Bachtar and Andrean 2020). Elektabilitas menjadi faktor rasional dalam strategi pemenangan.

Dinamika koalisi politik turut mempengaruhi arah keputusan pencalonan kader internal PKS. Dalam konteks Pilkada, partai politik jarang bertindak secara independen, melainkan membangun koalisi untuk memperkuat basis dukungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi antar partai seringkali mengharuskan PKS untuk mempertimbangkan kandidat dari luar kader internal sebagai bagian dari kompromi politik. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara kepentingan kaderisasi dan kebutuhan strategis dalam memenangkan kontestasi. Temuan ini sejalan dengan Solikhin yang menekankan pentingnya koalisi dalam politik lokal Indonesia (Solikhin 2017). Koalisi menjadi arena negosiasi yang kompleks dalam menentukan kandidat.

Tekanan publik dan dinamika kompetisi lokal juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pencalonan. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap figur pemimpin daerah mendorong partai untuk lebih selektif dalam menentukan kandidat. Analisis menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas, kapasitas, dan rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan penting dalam keputusan akhir. Selain itu, keberadaan kandidat kuat dari partai lain turut mempengaruhi strategi pencalonan PKS. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan pencalonan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Analisis ini memperkuat argumen Aspinall dan Sukmajati (2016) yang menyatakan bahwa Pilkada di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kontekstual (Suheri 2025). Dengan demikian, keputusan pencalonan kader internal PKS tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan multidimensional yang saling berinteraksi.

PEMBAHASAN

Dinamika pencalonan kader internal PKS dalam Pilkada 2024 Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan melalui kerangka teori seleksi kandidat dalam partai politik yang menekankan interaksi antara struktur organisasi dan rasionalitas elektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses yang tampak terstruktur tidak sepenuhnya bersifat deterministik, melainkan adaptif terhadap konteks politik lokal. Kondisi ini sejalan dengan teori kandidat selection yang dikemukakan oleh Janjalani yang menyatakan bahwa proses seleksi kandidat merupakan arena kontestasi antara berbagai aktor internal dengan kepentingan yang beragam (Janjalani 2025). Adaptasi tersebut terjadi karena partai dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjaga identitas kaderisasi sekaligus merespons tekanan kompetisi elektoral yang semakin kompleks.

Dominasi struktur pusat dalam pengambilan keputusan pencalonan mencerminkan pola sentralisasi dalam organisasi partai yang masih kuat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif institutional party theory yang mana tingkat

institusionalisasi partai sangat dipengaruhi oleh konsistensi aturan internal dan distribusi kekuasaan. Sentralisasi keputusan dalam PKS menunjukkan adanya upaya menjaga kontrol ideologis dan kualitas kandidat, namun di sisi lain berpotensi mengurangi otonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriyah yang menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia cenderung mempertahankan kendali elite pusat dalam proses strategis, termasuk pencalonan kepala daerah (Fitriyah 2020).

Ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik menjadi fenomena yang menjelaskan mengapa kader internal tidak selalu menjadi pilihan utama. Perspektif teori partai dapat digunakan untuk memahami kondisi ini, di mana partai cenderung mengutamakan keberlangsungan kekuasaan dibandingkan fungsi representasi ideologis. Dalam konteks PKS, meskipun memiliki sistem kaderisasi yang kuat, keputusan pencalonan tetap mempertimbangkan peluang kemenangan secara rasional. Temuan ini konsisten dengan studi Basyir yang menunjukkan transformasi PKS menuju partai yang lebih pragmatis dalam strategi politiknya (Basyir 2014).

Peran elektabilitas sebagai faktor dominan dalam penentuan kandidat dapat dijelaskan melalui pendekatan *rational choice* dalam politik elektoral. Partai bertindak sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan peluang kemenangan dengan memilih kandidat yang memiliki dukungan publik tinggi. Dalam sistem demokrasi kompetitif, partai cenderung mengedepankan kandidat yang mampu menarik suara pemilih secara luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas elektoral seringkali menggeser prioritas kaderisasi, terutama dalam kontestasi Pilkada yang sangat kompetitif seperti di Kota Bandar Lampung.

Pengaruh kedekatan dengan elite partai dalam proses pencalonan dapat dianalisis melalui konsep *patron-client relationship* dalam politik. Hubungan informal antara kader dan elite menciptakan akses yang tidak merata dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun partai memiliki mekanisme formal, praktik informal tetap memainkan peran penting. Keberadaan relasi patronase ini menjelaskan mengapa proses seleksi kandidat tidak sepenuhnya berbasis meritokrasi.

Dinamika koalisi politik yang mempengaruhi pencalonan kader internal menunjukkan bahwa partai tidak dapat bertindak secara independen dalam sistem multipartai. Perspektif *coalition theory* menjelaskan bahwa partai harus melakukan kompromi untuk mencapai tujuan strategis, termasuk dalam penentuan kandidat. Sidqi menegaskan bahwa politik lokal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh negosiasi antar partai dalam membangun koalisi (Sidqi et al. 2025). Kondisi ini menyebabkan PKS harus mempertimbangkan kandidat eksternal sebagai bagian dari strategi koalisi, sehingga mengurangi peluang kader internal untuk diusung secara mandiri.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam pencalonan kader internal PKS menunjukkan bahwa keputusan partai merupakan hasil dari proses yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan mixed-motive framework dalam studi partai politik menjelaskan bahwa keputusan strategis partai tidak hanya didorong oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi antara ideologi, kepentingan organisasi, dan tekanan lingkungan eksternal. Temuan ini memperkuat argumen Labolo yang menyatakan bahwa partai di Indonesia cenderung bersifat adaptif terhadap perubahan konteks politik (Labolo, Ilham, and Stp 2017). Dengan demikian, dinamika pencalonan kader internal PKS di Kota Bandar Lampung mencerminkan proses negosiasi antara idealisme kaderisasi dan realitas politik elektoral yang tidak dapat dipisahkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi PKS tetap menjadi fondasi utama dalam proses penjurangan calon kepala daerah. Seluruh kandidat internal terlebih dahulu melalui mekanisme pembinaan, penilaian kapasitas, dan proses organisasi yang telah ditetapkan partai. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kaderisasi belum menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir pencalonan. Pada tahap akhir, pertimbangan elektabilitas, peluang koalisi, serta potensi kemenangan menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan loyalitas kader semata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PKS sedang berada pada fase adaptasi antara mempertahankan identitas sebagai partai kader dengan tuntutan kompetisi elektoral. Dalam konteks Pilkada Kota Bandar Lampung, partai lebih memilih pendekatan rasional untuk memaksimalkan peluang kemenangan dibandingkan mempertahankan idealisme kaderisasi secara penuh. Temuan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa sistem kaderisasi yang kuat belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan suara elektoral PKS secara nasional. Meskipun mampu menjaga konsistensi basis pemilih, sistem kaderisasi belum menghasilkan ekspansi dukungan yang signifikan sehingga partai tetap mempertimbangkan figur dengan tingkat elektabilitas tinggi sebagai strategi memenangkan kontestasi politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika pencalonan kader internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024 berlangsung melalui proses yang terstruktur secara formal, namun dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara mekanisme organisasi, kepentingan elite, dan tuntutan elektoral. Proses pencalonan tidak hanya merefleksikan implementasi sistem kaderisasi yang kuat, tetapi juga menunjukkan adanya adaptasi terhadap realitas politik yang kompetitif, sehingga menghasilkan ketegangan antara idealisme kaderisasi dan pragmatisme politik. Faktor internal

seperti loyalitas kader, kapasitas politik, dan kedekatan dengan elite partai berperan signifikan dalam tahap penjangkaran dan seleksi awal, sementara faktor eksternal seperti elektabilitas, dinamika koalisi, tekanan publik, dan kompetisi politik lokal menjadi determinan utama dalam keputusan akhir pencalonan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa keputusan pencalonan kader internal PKS merupakan hasil dari proses multidimensional yang mencerminkan upaya partai dalam menyeimbangkan antara konsistensi ideologis dan strategi kemenangan politik, sehingga mempertegas karakter adaptif partai dalam menghadapi dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu partai politik di satu daerah sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh partai politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga interpretasi sangat bergantung pada pengalaman para informan. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antara PKS dengan partai lain yang memiliki karakter organisasi berbeda, seperti PDIP, Golkar, atau Gerindra. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk mengukur pengaruh kaderisasi terhadap peluang kemenangan elektoral secara lebih komprehensif.

IMPLIKASI PRAKTIS DAN TEORETIS

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperkuat konsistensi antara sistem kaderisasi dan mekanisme pencalonan politik melalui penyusunan model seleksi kandidat yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, sehingga mampu menjaga loyalitas kader sekaligus meningkatkan daya saing elektoral. Partai perlu mengoptimalkan integrasi antara penilaian kapasitas kader dan indikator elektabilitas secara proporsional agar tidak terjadi disorientasi antara idealisme organisasi dan pragmatisme politik. Implikasi teoretis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi rekrutmen politik dan institusionalisasi partai di tingkat lokal, dengan menegaskan bahwa proses pencalonan kandidat tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui pendekatan struktural atau rasional, melainkan melalui perspektif integratif yang mengakomodasi interaksi faktor internal dan eksternal secara simultan. Temuan ini juga memperkaya literatur mengenai partai berbasis kader dengan menunjukkan adanya dinamika adaptif dalam menghadapi tekanan sistem demokrasi elektoral yang kompetitif, sehingga membuka ruang pengembangan model konseptual baru dalam studi kandidat selection di negara berkembang.

REFERENCES

- Arpanudin, Iqbal. 2010. "Kontribusi Halaqah Dalam Meningkatkan Efektifitas Rekrutmen Kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya."
- Arrasyid, Sibghatullah, and Zainal Abidin. 2020. "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998–2017." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 5(1).
- Bachtiar, Luthfi Hasanah Bolqiah, and Saefudin Andrean. 2020. "Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* 73–92.
- Basyir, Ach. 2014. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3(2). doi: <https://doi.org/10.14421/inright.v3i2.1263>.
- Bilqis, Zahra Maulina, Farah Naila Puspitasari, and Arselia Bella Ananta. 2025. "Dinamika Perilaku Politik Partai Dalam Pembentukan Strategi Kampanye Terhadap Stabilitas Politik Di Era Digital." *Journal of Indonesian Social Studies Education* 3(1):27–35.
- Chalik, Abdul. 2017. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Mixed Methods Procedures*.
- Fitriyah, Fitriyah. 2020. "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11(1):1–17. doi: <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Hadi, Fikri, and Farina Gandryani. 2024. "Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif." *Majalah Hukum Nasional* 54(2):157–79. doi: <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.400>.
- Haq, Yurid Al Izzatul Insanul, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. 2025. "Formulasi Kaderisasi Oleh Partai Politik Dalam Dinamika Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada 2024 Perspektif Siyasa Dustriyah." *AL-MUTSLA* 7(2):325–44. doi: <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1962>.
- Harjanto, Nico. 2011. "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia." *Analisis Csis* 40(2):138–59.
- Janjalani, Andy Layla. 2025. "Dinamika Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar."
- John Creswell et al. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Vol. 4.
- Kusnadi, Iwan Henri, M. Wawan, and M. Dian Hikmawan. 2024. "Dynamics and Pragmatism in the Recruitment of Regional Head Candidates by the 'Keadilan Sejahtera' Party (PKS) in the 2020 Pandeglang Regional Election." *Journal of Governance* 9(1):176–88. doi: <https://dx.doi.org/10.31506/jog.v9i1.24524>.
- Labolo, Muhadam, Teguh Ilham, and S. Stp. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Manurung, Tanti Adriani. 2018. "Memperbaiki Sistem Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat Yang Berkualitas." *Jurnal Lemhannas RI* 6(3):55–60.

- Noor, Firman. 2018. "Pilkada, Peran Partai Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim Tahun 2017-2018." *Journal of Political Research* 15(2):179-96. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.759>.
- Rahawarin, Zainal Abidin. 2022. "Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah."
- Rahma, Fatiya Nur, and Windawati Pinem. 2025. "Peran Partai Gerindra Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 Di Kota Medan." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10(4):959-73. doi: <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6009>.
- Richter, Solveig. 2017. "Two at One Blow? The EU and Its Quest for Security and Democracy by Political Conditionality in the Western Balkans." Pp. 119-46 in *Conflicting objectives in democracy promotion*. Routledge.
- Ridwan, Mochamad Atami, and Fatkhuri Fatkhuri. 2023. "Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5(1):1-16. doi: <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.16789>.
- Saputra, Ilham, Dea Rizky Amalia, Fauzan Hidayatullah, and Andi Ummu Kultsum. 2025. "Dinamika Kegagalan Anies Baswedan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pada PILKADA 2024." *Jurnal Neo Societal* 10(2):112-26. doi: <https://doi.org/10.46874/x939ct09>.
- Sholeh, Febrian Taufiq. 2015. "Manhaj Tarbiyah Dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)." *Jurnal Salam* 18(1).
- Sidqi, Nur Fadilah, Muhammad Ikhlasul Amal, Muthi'a Hafidza, and Pia Khoirotun Nisa. 2025. "Negosiasi Politik Dalam Pembentukan Koalisi Di Indonesia: Studi Kasus Pilpres 2024." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10(4):101-10.
- Solikhin, Ahmad. 2017. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia." *Journal of Governance* 2(1).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Afabeta.
- Suheri, Heri. 2025. "Aspek Hukum Dan Konstitusionalitas Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 20(2):30-39.
- Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1(2):111-19.
- Syamsuadi, Amir, Zamhasari Zamhasari, Seri Hartati, and Liza Trisnawati. 2020. "Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(1):1-22. doi: <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.8162>.
- Wicaksono, Agung Tri. 2023. "Problematisasi Dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3(2):280-96. doi: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.542>.

- Wijaya, Dody, and Aditya Perdana. 2024. "Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi Koalisi Besar Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Pemilih." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6:160-81. doi: <https://doi.org/10.46874/h72ddc90>.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications*. Vol. 6. Sage Thousand Oaks, CA.
- Yusra, Amri, Lili Romli, and Firman Noor. 2022. "Seleksi Kandidat Dalam Kontestasi Elektoral: Studi Kasus Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Tahun 2005 Dan Tahun 2020." *Jurnal Penelitian Politik* 19(1):1-21. doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v19i1.1132>.